

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan peneliti dalam membuat suatu rangka penelitian, maka dibutuhkannya suatu landasan berpikir dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan pedoman untuk menjelaskan masalah yang diteliti.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mauritus Van Pranata dan Jimmy Nami pada tahun 2020 tentang Peran Elit Lokal dan Budaya Lonto Leok Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2023 menjelaskan bahwa elit lokal memiliki andil yang cukup besar dalam mempengaruhi pilihan masyarakat pada pilkada di Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan peran elit lokal dan budaya lonto leok dalam mempengaruhi perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Lokus dari penelitian ini adalah Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu : 1) Peran Tua Golo, Tua Teno, Tua Gendang, Tua Kilo, dan Tua Panga sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat termasuk aktivitas politik terhadap masyarakat di bawahnya. 2) Elit lokal mendukung paket TS-YBA dikarenakan salah satu pasangan calon merupakan putra asli desa Compang Kempo sehingga para elit lokal mengarahkan masyarakat untuk memilih paket TS-YBA dalam lonto leok. 3) Seiring perkembangan zaman makna budaya lonto leok menjadi kabur, sehingga definisinya menjadi kurang jelas. Hal ini disebabkan karena budaya lonto leok termordernisasi oleh perkembangan zaman. 4) Elit lokal yang didukung oleh status sosial mereka yang tinggi dan diakui oleh masyarakat memiliki otoritas secara komunal karena mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai diaman hal tersebut mendukung gaya komunikasi politik mereka. 5) Elit lokal memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat di mana merekapun aktif dalam kegiatan dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pilihan masyarakat setempat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Destrina Lumendek pada tahun 2017 tentang Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Fokus dari penelitian ini adalah peranan elit lokal masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah 2017, di Desa Sopi Majiko, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa para elit politik dan masyarakat yang ada di desa Sopi Majiko dalam bidang ekonomi memiliki ketergantungan antara masyarakat dengan elit lokal. Dengan modal ekonomi, dapat mampu membangun hubungan yang kuat antara keduanya. Peranan yang digunakan elit lokal desa Sopi Majiko dalam memperoleh dukungan suara mengandalkan status sosialnya, kemampuan, kecerdasan, serta keterampilan yang dimikinya. Ada juga beberapa elit lokal yang menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat.

2.2 Landasan Teori

1. Pengertian Pilkada

Sebuah negara yang demokratis merupakan negara yang sepenuhnya mengedepankan kedalautan rakyatnya. Kedalautan rakyat tersebut tertuang lewat hak-hak rakyat untuk memilih pemimpinnya lewat suatu pemilihan umum yang terstruktur yang termuat di dalam konstitusi. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) adalah suatu bentuk nyata diberlakukannya prinsip demokrasi yang di mana rakyat memiliki kedalautan penuh untuk memilih pemimpin-pemimpinnya untuk duduk di bangku pemerintahan.

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat (Titik Triwulan Tuti, 2015:270). Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara demokratis. Soedarsono (2005:124) mengemukakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Pada hakekatnya Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Ramlan (1992:181) berpendapat bahwa pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan kedalautan kepada orang atau partai yang dipercaya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 56 ayat 1 disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2005:2).

Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan sebuah peningkatan demokratisasi di tingkat lokal dengan terlibatnya masyarakat daerah setempat dalam menentukan hak pilihnya secara langsung. Winarno (2002:11) mengemukakan bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realitis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih. Secara garis besar, dengan adanya pilkada secara langsung proses demokratisasi di tingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat di daerahnya di mana para pemimpin tersebut bertanggung jawab untuk merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yakni melaksanakan kedalautan rakyat.

2. Parameter Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dapat disebut sebagai pemenuhan amanat demokrasi apabila memenuhi beberapa parameter dan tolok ukur. Robert Dahl, Samuel Huntington, dan Bingham Powel (1978) mengemukakan beberapa parameter suatu pemilihan yang demokratis :

- Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur
Rekrutmen jabatan publik dan politik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan sesuai dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan jalan bagi terwujudnya demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya untuk menentukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin dinilai berdasarkan kualitas dan kemampuannya dalam merealisasikan janjinya sesuai dengan visi dan misinya sebelum pemilihan umum itu dilaksanakan. Penilaian terhadap pejabat publik digunakan sebagai indikator dalam memberikan ganjaran dan hukuman (reward and punishment).
- Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan
Rotasi kekuasaan juga merupakan salah satu parameter demokrasi yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa sebuah kekuasaan atau jabatan bukanlah suatu hal yang mutlak dalam arti kekuasaan tersebut tidak bisa dipegang secara terus-menerus layaknya pada sistem pemerintahan yang otoriter. Demokrasi memberikann peluang agar kekuasaan tersebut dapat beralih dari satu kepala daerah ke kepala daerah lain, dan juga dari satu partai politik ke satu partai politik lainnya.
- Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka
Semua kelompok dan golongan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dalam hal ini yakni seorang kepala daerah. Tidak menutup kemungkinan semua masyarakat dari berbagai kalangan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
- Akuntabilitas politik
Para pemimpin kepala daerah terpilih harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai program kerja yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misinya pada masa pencalonan kepala daerah. Hal ini dapat

menunjukkan kualitas dan akuntabilitas dari seorang kepala daerah. Pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, karena itu ia harus dapat menjaga, memelihara, dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut (Joko J.Prihatmoko,2005:35-36).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara yang demokratis, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dapat dikatakan relatif kecil.

Warga negara hanya terdiri dari masyarakat sederhana dan cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Menurut Ramlan Subakti (2007:142), partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Menurut Barber, intensitas partisipasi individu dapat digolongkan ke dalam dua kategori besar, yakni partisipasi politik yang intensif dan partisipasi politik yang tidak intensif. Partisipasi yang intensif berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Sedangkan partisipasi yang tidak intensif berkaitan dengan pemilihan umum.

4. Prinsip Pemilihan Umum Kepala Daerah

Prinsip pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hesu Cipto Handoyo (2009:254-258), menjelaskan mengenai asas-asas pemilihan umum sebagai berikut:

- Langsung

Seorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari manipulasi kehendak dari perantara, siapapun perantara itu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

- Umum
Setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, maupun agama, warna kulit, golongan, selagi memenuhi persyaratan objektif semisal umur, tidak hilang ingatan, dan tidak sedang menjalani hukuman dapat mengikuti pemilihan umum.
- Bebas
Mengandung dua dimensi, yaitu bebas untuk dan bebas dari. Bebas untuk maksudnya setiap warga negara yang berhak memilih mempunyai kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi, dan pilihannya, serta bebas untuk menghadiri, mendengar, atau tidak menghadiri dan tidak mendengar kampanye partai politik. Sedangkan bebas dari mengandung maksud bahwa setiap warga negara harus terbebas dari intimidasi, dan paksaan dalam bentuk apapun.
- Rahasia
Merupakan asas yang merujuk pada situasi di mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh orang lain.
- Jujur
Setiap tindakan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktek intimidasi, manipulasi, penipuan, dan pembelian suara.
- Adil
Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah diperlakukan sama oleh setiap unsur penyelenggara pemilu.

5. Manfaat Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut Radian Salman, setidaknya terdapat tiga alasan penting pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung yaitu : akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah, kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, dan sistem pertanggungjawaban yang tidak saja kepada DPRD atau pemerintah pusat, tetapi langsung kepada masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat membawa keuntungan:

- 1) Rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya sekaligus memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah terpilih,
- 2) Mendekati calon kepala daerah kepada rakyat yang memilih,

3) Membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan masalah dan kepentingan masyarakat dan daerahnya,

4) Mengurangi peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan politik uang.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Laode Harjudin menyatakan bahwa berdasarkan sifat yang dikandungnya, sistem pilkada secara langsung memiliki tiga implikasi penting, yaitu: 1) dengan keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar dapat menghindari kemungkinan manipulasi dan kecurangan, semisal money politik atau politik uang, 2) pilkada langsung akan memberikan legitimasi kuat bagi pemimpin yang terpilih karena mendapat dukungan dari masyarakat luas, 3) mengembalikan kedalautan di tangan rakyat.

2.3 Konsep Elit

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Satu individu atau kelompok individu inilah yang lazim disebut elit (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 131). Dalam istilah Laswell, elit adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Sementara menurut Pareto, elit adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, adanya yang memegang kekuasaan (governing elite) dan ada yang di luar kekuasaan (non governing elite).

Dalam teori elit klasik, terdapat beberapa kecenderungan yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memberikan kategori elit.

1) Perspektif psikologi. Pandangan psikologis terhadap elit dikemukakan oleh Vilfredo Pareto (1848-1923). Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang selalu menjangkau kekuasaan pusat selalu merupakan aktor terbaik, dan merekalah yang disebut elit. Elit adalah orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat.

2) Pendekatan organisasi. Elit dilihat dari sudut pandang organisasi yang dikemukakan oleh Mosca dan Michels. Menurut Gaetano Mosca (1858-1941), orang

hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya. Gaetano Mosca menggambarkan masyarakat sebagai berikut: “ Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk; satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama”. Roberto Michels (1876-1936) berhubungan dengan *iron law of oligarchy* atau hukum besi oligarki yang dinyatakannya sebagai suatu dari sekian banyak hukum besi dalam sejarah, di mana sebagian masyarakat demokrtis modern, dalam masyarakat itu sendiri, serta partai-partai yang sudah berkembang tak lagi dapat melepaskan diri darinya. Tumbuhnya oligarki semacam ini didukung oleh Michels dengan konsepnya tentang “pikiran masyarakat”. Mayoritas manusia menurut Michels adalah apatis, malas dan berjiwa budak, serta tidak mampu memerintah diri sendiri, mereka terbiasa dalam ketidaktepatan dan seperti budak dengan adanya paksaan. Dari inilah muncul yang dikenal dengan istilah elit oligarki.

3) Pendekatan ekonomi. Pandangan ini dikemukakan oleh James Burnham. Dalam salah satu karyanya “*The Managerial Revolution*” (1941), dia sependapat dengan pola pikir Marxist bahwa faktor produksi yang membuat masyarakat menjadi dominan. Masyarakat pada dasarnya terikat oleh satu kekuatan yang dapat memberikan posisi dominan di kelasnya. Kata “kontrol” menjadi salah satu kunci pemikiran Burnham. Kontrol dimaknai sebagai “access” untuk memperoleh kesempatan mengembangkan ekonominya.

4) Pendekatan institusi. Pandangan ini dikemukakan oleh C. Wright Mills. Menurut pemikiran ini, faktor hierarki dan kedekatan personal lebih menguntungkan daripada pendekatan professional dan ekonomi. Masing-masing lembaga yang ada di suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, yang memungkinkan seseorang mencapai puncak kekuasaan tanpa didasari oleh pertimbangan professional tetapi karena pertimbangan hierarki dan kedekatan personal orang lain. Mills kemudian samapai pada suatu pernyataan, “*behind men’s black*”, bahwa dalam beberapa kasus ternyata kekuasaan juga dikontrol oleh kekuatan lain yang memiliki kemampuan lobi untuk mempengaruhi kekuasaan itu. Mereka inilah yang disebut kaum elit yang dapat mempengaruhi dan merubah suatu kebijakan.

2.4 Teori Elit

Vilfredo Pareto (1848 - 1923) menggunakan kata elit untuk menjelaskan adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial (T.B. Bottomore, 1996). Pareto percaya bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang - orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

Lebih jauh, Pareto dalam Bottomore (1996) membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu pertama, elit yang memerintah (*governing elite*) yang terdiri dari individu - individu yang secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. Kedua, elit yang tidak memerintah (*non - governing elite*). Jadi menurutnya, dalam lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.

Tak jauh berbeda dengan Pareto, Gaetano Mosca (1858 - 1941) memberikan gagasan tentang elit bahwa dalam semua masyarakat selalu muncul dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keistimewahan. Sedangkan kelas yang dikuasai jumlahnya lebih banyak, diperintah, dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah dengan cara yang masa kini kurang lebih legal diktatorial dan kejam (T.B. Bottomore, 1996).

Mosca percaya bahwa yang membedakan karakteristik elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik, sekali kelas yang memerintah tersebut hilang kepercayaan dan orang - orang yang diluar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh penguasa yang baru. Kemudian, Bottomore (1996) menegaskan baik Pareto, maupun Mosca, keduanya memusatkan kajiannya pada elit dalam artian kelompok orang yang secara langsung menggunakan atau berada dalam posisi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan politik.

Skema konseptual yang telah diwariskan oleh Pareto dan Mosca mencakup gagasan - gagasan umum bahwa setiap masyarakat ada dan harus ada suatu minoritas yang menguasai anggota masyarakat lain. Minoritas itu adalah kelas politik atau

elit yang memerintah yang terdiri dari mereka yang menduduki jabatan - jabatan komando politik dan secara lebih tersamar, mereka yang dapat langsung mempengaruhi keputusan - keputusan politik. Dalam perspektif Pareto maupun Mosca, elit menunjuk kepada sesuatu yang memerintah menjalankan fungsi – fungsi sosial yang penting, dan mewakili dari sebagian dari nilai – nilai sentral masyarakat. (Yusron,2009).

Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa (massa). Elit politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik.

Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik. Menurut Syamsudin (2010), untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik ada beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode Posisi. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi. Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh. Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu, orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Menurut dua tokoh kunci teoretis elit klasik, Mosca dan Pareto, perbedaan pandangan tentang sumber daya yang digunakan oleh kaum elit dalam proses kekuasaan, namun keduanya bersepakat negara dan masyarakat sipil ditandai oleh pembagian kekuasaan yang tak terelakkan antara elit dan massa. Keniscayaan kekuasaan elit itulah yang membuat mereka berdua menolak pandangan tentang kedaulatan rakyat.

Mosca berpendapat bahwa bahkan praktek pemilihan demokrasi yang riil pun dimanipulasi oleh kaum elit : „mereka yang mempunyai keinginan, dan khususnya, sarana moral, intelektual, dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, akan memimpin dan memerintah mereka. Selanjutnya, walaupun Mosca dan Pareto sama-sama mempunyai opini tentang kelemahan massa, tetapi mereka berbeda pandangan tentang basis untuk kekuasaan elit. Mosca sendiri menyangkal bahwa kaum elit pastilah unggul moral atau bahkan intelektualnya, dan memandang *skill* keorganisasian sebagai kunci bagi kekuasaan elit. Sedangkan Pareto lebih militan tentang *superioritas* (keunggulan) kaum elit dari segi karakter psikologis dan pribadi yang sesuai untuk pemerintahan. Pareto berbicara tentang elit politik dari segi kekuatan fisik dan mental mereka. Dengan lugas, Pareto mengatakan bahwa kalangan elit akan menjadi rentan digulingkan ketika mereka lebih lembut, lebih lunak, lebih manusiawi dan kurang mampu mempertahankan kepentingan pribadi.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa “hukum besi oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Manipulasi massa melalui pemanfaatan kekuasaan komunikasi merupakan tema yang kuat dalam tulisan Pareto maupun Mosca.

Menurut Pareto, manusia dan khususnya massa sebagian besar adalah irasional: „sebagian besar tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran logis, melainkan dari perasaan“. Oleh karena itu, unsur kunci dalam kekuasaan elit adalah persuasi. Melalui penciptaan “keyakinan hidup” (*living faith*), kekuasaan pun dimantapkan. Sedangkan, menurut Mosca, kelas penguasa dari negara manapun berusaha melegitimasi “formula politik” (*political formula*) yang tampak cocok dengan keadaan historis yang ada.

Pada sisi yang lain, Vilfredo Pareto justru tidak pernah percaya bahwa tindakan manusia ditentukan oleh tujuan yang sebenarnya (*true ends*), namun Pareto juga tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia tidak pernah memahami alasan-alasan (*reasons*)

tindakan mereka. Pareto menyebut pola tindakan sosial irrasional itu sebagai *residues* dan upaya untuk membuat tindakan yang irrasional itu supaya kelihatan rasional sebagai *derivations* (Rule, 1988).

Pada bagian lain Pareto juga mengemukakan tentang berbagai jenis pergantian antara elit, yaitu pergantian : (1) di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri, dan (2) di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (a) individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, dan/atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

2.5 Elit Lokal

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menarik untuk dicermati keberadaan dan peran elit politik lokal. Jatuhnya rezim Orde Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi elit politik lokal untuk mengekspresikan eksistensi dan perannya dalam proses demokratisasi langsung di daerah. Munculnya asas desentralisasi yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari adanya sistem pemerintahan daerah otonom, memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan sistem pemerintahannya tanpa harus mengikuti kewenangan dari pusat.

Elit politik lokal sendiri merupakan seseorang yang menduduki jabatan politik atau kekuasaan di eksekutif dan legislatif yang terpilih melalui pemilihan umum dan dipilih melalui proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik di tingkat lokal dan menjalankan kebijakan-kebijakan politik di daerah. Suzzana Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elit itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca, dan Pareto). Kedua, menurut Saint Simon, Karl Mainheim, dan Raymond Aron beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. Adapun elit politik lokal berarti mereka yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan politik di daerah. Vilfredo Pareto (1848-1923:199) menggunakan kata elit untuk menjelaskan adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial. Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh setiap kelompok kecil orang yang mempunyai

kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik, merekalah yang dikenal sebagai elit.

Elit merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Lebih jauh, Pareto dalam SP.Varma (2001:199-202) membagi kelas elit ke dalam dua kelas yaitu pertama, elit yang memerintah (*governingelite*) yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. Kedua, elit yang tidak memerintah (*non-governingelite*). Jadi, menurutnya dalam lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, yaitu lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Lebih lanjut, Keller mengemukakan bahwa elit berpengaruh dalam kondisi masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogenitas yang disebut sebagai elit strategis.

Dalam masyarakat yang modern, elit strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, elit tradisional dianggap sebagai elit strategis yang memiliki kemampuan untuk berkuasa lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya sehingga memiliki dampak penghormatan yang lebih dari pengikut-pengikutnya. Secara garis besar, elit adalah orang-orang yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat berkat kemampuan-kemampuan yang dimilikinya.

Dalam studi sosial, golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dikenal sebagai golongan elit. Pada pengertian sosiologis dan politis, elit adalah *the ruling class*, yaitu suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukan yang dimiliki, elit dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat timbal balik. Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa elit merupakan produk dari masyarakat lokal setempat. Lebih jauh, Robert Michel berkeyakinan bahwa, dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat selalu terdapat “hukum besi oligarki” yang tidak dapat terelakan. Dalam masyarakat dan organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri.

Dari beberapa penjelasan di atas, memberikan gambaran umum bahwa peranan elit dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihilangkan. Sebagai tokoh yang berpengaruh, elit mendorong massa menuju kepada arah untuk mewujudkan

kepentingannya. Elit merupakan kumpulan orang atau sekelompok orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam sebuah lapisan masyarakat.

2.6 Budaya Lonto-Leok

1. Pengertian Budaya Lonto-Leok

Budaya Lonto Leok Manggarai merupakan salah satu budaya orang Manggarai yang sudah ada sejak dahulu kala dan nilai-nilainya masih dipertahankan sampai sekarang. Sebagai suatu budaya yang merupakan warisan leluhur, Lonto Leok menjadi budaya yang selalu berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan orang Manggarai baik aspek sosial, politik, ekonomi, maupun aspek budaya. Lonto Leok berasal dari dua kata, yakni Lonto dan Leok. Lonto artinya duduk dan Leok artinya kepung, keliling, dan mengepuk. Secara harafiah, lonto leok dapat diartikan sebagai duduk mengelilingi atau duduk melingkar.

Petrus Janggur (2010 : 135) menjelaskan bahwa Lonto Leok mempunyai arti duduk melingkar untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksud dapat ditemukan dalam ranah sosial, politik, ekonomi, hukum, Pendidikan, dan budaya. Konsep lonto leok juga sering digunakan untuk melakukan musyawarah atau pertemuan mengenai berbagai masalah yang ada di kampung agar tercapainya kata mufakat sehingga baik kepala suku ataupun masyarakat merasa puas terhadap setiap keputusan yang dibuat.

Occe Idaman (2020, dalam NTT Progressif) budaya lonto leok memiliki dua makna penting. Pertama, menyatukan kata. Lonto leok adalah ajang untuk merundingkan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Ideal lonto leok adalah mampu menyamakan persepsi dan menyatukan aspirasi para peserta. Semua partisipan yang hadir diharapkan dapat *nai ca anggit* atau dalam bahasa Indonesia berarti menyatukan hati dengan sedapat mungkin menghindari adanya *woleng curup* atau perselisihan pendapat. Kedua, menyatukan Langkah. Lonto Leok menjadi medan untuk menyatukan Langkah dan menyelaraskan derap atau irama gerak bersama.

Pada tataran ini, semua partisipan lonto leok diharapkan untuk *tuka ca leleng* atau sehati dan bersaudara, tidak berbeda arah dan sasaran perjuangan dengan berusaha menghindari kemungkinan untuk *woleng lako* atau cerai-

berai. Dengan cara ini, penyewelengan atau penyimpangan dalam tataran pelaksanaan dapat dihindari. Dengan demikian, visi kelompok untuk kekompakan seperti *teu ca ambo neka woleng lako* yang artinya tebu serumpun jangan tercerai-berai dapat terjamin (John Dami Mukese dalam Martin Chen dan Charles Suwendi eds 2012 : 122).

Tempat pelaksanaan *lonto leok* adalah *mbaru gendang* (rumah adat). *Mbaru gendang* merupakan rumah adat atau rumah induk untuk rumah-rumah yang ada di sebuah kampung. Eksistensinya *mbaru gendang* bukan terletak pada ukurannya, melainkan pada fungsi sebagai tempat tinggal pemimpin adat (*tu'a adat*) dan tempat berlangsungnya kegiatan adat yang menyangkut hidup bersama dalam sebuah kampung. *Mbaru Gendang* merupakan tempat *neki weki ranga manga kudut bantang pa'ang olo ngaung musi* (tempat berkumpul semua warga kampung untuk bermusyawarah mufakat).

Pius Pandor dalam tulisannya 'Menyibak Praksis *Lonto Leok* dalam Demokrasi Lokal Manggarai' mendefenisikan tradisi *lonto leok* sebagai model demokrasi lokal yang mengatur semua tata kehidupan orang Manggarai seperti pemeliharaan perdamaian dan keamanan, penegakan hukum adat, kesatuan dan persatuan, pemeliharaan kesusilaan dan sopan santun, pembagian tanah (*lingko*), pemeliharaan lingkungan hidup, partisipasi dalam upacara adat. Setiap masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab mengambil bagian dalam semua urusan masyarakat. Nilai-nilai yang ditekankan dalam tradisi *lonto leok* ini ialah nilai kesatuan dan persatuan. Setiap pribadi dalam sebuah masyarakat merupakan pribadi bebas sekaligus terikat kewajiban untuk melindungi dan menghormati kemerdekaan sesama warganya.

2. Unsur-Unsur Budaya Lonto-Leok

Petrus Janggur (2010 : 135) mengemukakan bahwa *lonto leok* memiliki unsur-unsur yang terintegral dalam upacara tersebut, yaitu :

- Mbaru Gendang (rumah adat)

Mbaru Gendang merupakan sebuah istilah orang Manggarai untuk menyebut sebuah rumah yang biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan gendang atau alat music tradisional orang Manggarai. Mbaru artinya rumah dan Gendang artinya alat music tradisional orang Manggarai yang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Mbaru Gendang juga merupakan tempat untuk menjalankan ritus-ritus adat orang

Manggarai semisal menjalankan ritus kepok yang di mana ritus ini merupakan cara orang Manggarai untuk menerima dan menyapa tamu yang datang. Selain sebagai ritus adat, mbaru gendang juga merupakan tempat tinggalnya Tua Golo yang adalah kepala Kampung. Dalam Mbaru Gendang ini jugalah tradisi lonto leok itu sendiri dilaksanakan. Masyarakat-masyarakat kampung datang dan duduk bersama dalam rumah gendang guna membahas setiap masalah yang terjadi di kampung, dan juga bisa membahas rencana-rencana yang akan dikerjakan secara bersama di masa yang akan datang.

- **Tua Golo**

Tua Golo dalam budaya orang Manggarai merupakan kepala suku yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Tua golo memiliki banyak peranan mulai dari mengatur kehidupan adat, budaya, maupun kehidupan sosial ekonomi. Tua golo merupakan sebuah jabatan yang bukan dipilih melalui hasil penghitungan suara terbanyak masyarakat, melainkan sebuah jabatan yang diwariskan secara turun-temurun kepada anak maupun cucu. Berbicara tentang tua golo dalam budaya lonto leok Manggarai tidak terlepas dari perannya yang sang besar yakni sebagai sang pengambil keputusan akhir saat dilaksanakan sebuah rapat ataupun musyawarah. Jadi, dalam setiap kali dilaksanakannya acara lonto leok kehadiran sang tua golo sangat dibutuhkan.

- **Bahasa adat atau goet**

Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa bagi orang Manggarai juga merupakan salah satu hal yang tidak dapat terlepas dari adat dan budaya terutama budaya lonto leok. Bahasa yang dipakai dalam budaya lonto leok bukanlah bahasa yang dipakai keseharian melainkan sebuah bahasa yang mengandung makna tertentu atau yang sering dikenal dengan istilah peribahasa. Peribahasa ini dalam kebudayaan orang Manggarai disebut goet.

- **Simbol adat**

Simbol adat dalam artian ini adalah segala material dan pernik-pernik yang digunakan saat lonto leok itu dilangsungkan. Simbol adat tersebut dapat berupa tuak kepok, ayam, dan pakaian adat. Ayam yang

digunakan bukanlah sembarang ayam melainkan ayam kampung. Dalam tradisi lonto leok juga tidak diperkenankan menggunakan pakaian semaunya, melainkan sebuah pakaian adat yakni towe songke atau kain songke

- Masyarakat atau warga kampung

Simbol adat yang dimaksud adalah material adat yang di pakai dalam upacara Lonto leok yang memiliki arti dan maknanya tersendiri seperti tuak kepok, ayam, dan pakaian adat yang dipakai dalam upacara tersebut.

3. Ragam dan Jenis Lonto Leok

Lonto Leok bukanlah suatu tradisi budaya utuh yang hanya memiliki satu bagian dan satu fungsi saja, melainkan terdiri berbagai macam ragam dan jenisnya sesuai dengan tujuan diadakannya lonto leok itu sendiri. Berikut merupakan ragam dan jenis budaya lonto leok :

- *Lonto Leok adat (riang adak)*

Merupakan jenis *Lonto Leok* yang diadakan dalam rangka upacara atau ritual adat yang akan atau sedang dilaksanakan di dalam kampung. Dalam *Lonto Leok* ini dibahas mengenai persiapan, kelangsungan upacara, biaya dan juga evaluasi sebuah upacara atau ritual adat.

- *Lonto Leok agama (riang imbi)*

Musyawaharah yang di adakan dalam rangka mempersiapkan upacara agama seperti misa syukur, pentabisan imam baru, kunjungan Uskup atau tokoh gereja.

- *Lonto Leok politik (riang pelitik/Negara)*

Merupakan jenis *Lonto Leok* dalam rangka kunjungan pemerintah, kegiatan yang diselenggarakan pemerintah atau sosialisasi tertentu yang diadakan dalam suatu kampong untuk memperlancar kegiatan dan melibatkan banyak orang dalam kegiatan tersebut.

- *Lonto Leok sekolah (riang sekolah kudut mbiang dila, tea near)*

Yakni *Lonto Leok* yang diadakan untuk persiapan sekolah, pesta sekolah, ritual *wuat wa'I*, dll. Inti dari *Lonto Leok* ini adalah

meminta dukungan moral maupun material dari segenap warga kampung untuk persiapan sekolah anak.

4. Prinsip-Prinsip Lonto Leok

Lonto leok merupakan kebudayaan orang Manggarai yang muncul berdampingan dengan prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang membuat tradisi lonto leok terus hidup dan berkembang dalam kehidupan orang Manggarai. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam budaya lonto leok :

- *Muku ca pu'u neka woleng curup*
Artinya, pisang serumpun jangan berbeda kata. Dalam *Lonto Leok* yang hadir adalah serumpun warga kampung. Di sana terjadi bantang cama reje lelung (bersama-sama melakukan rapat dengar-pendapat). Hasil dari *Lonto Leok* yang diharapkan adalah semua warga seia sekata seperti tumbuhan pisang yang selalu bertumbuh secara merumpun atau mengelompok.
- *Teu ca ambo neka woleng lako*
Artinya tebu serumpun jangan beda jalan. Prinsip ini juga merujuk hasil dari *Lonto Leok* tersebut. Maksud dari prinsip ini adalah apa yang telah di putuskan bersama harus diikuti dan di jalani. Beda jalan bukanlah tujuannya.
- *Ipung ca tiwu neka woleng wintuk*
Arti harafiah dari go'et ini adalah ikan sekolam jangan berbeda tindakan. Prinsip ini menekankan kesamaan tindakan. Di sini mau di tunjukkan bahwa semua warga kampung harus bertindak bersama-sama.
- *Nakeng ca wae neka woleng tae*
Artinya, ikan se-kali (sungai) jangan berbeda bicara. Prinsip ini menekankan kesamaan kata. Maksudnya apa yang telah di sepakati itulah yang dibicarakan. *Neka somor nggara olo sumir nggara musi* (jangan plin plan ke depan lain ke belakang).

- *Ema agu anak neka woleng curup*
Artinya, ayah dan anak jangan berbeda kata. Prinsip ini menunjukkan bahwa orang tua sejatinya harus sekata dengan anak-anaknya. Dan juga generasi tua harus sekata dengan generasi mudah.
- *Weta agu nara neka woleng bantang*
Secara harafiah artinya adalah sauari dan saudara jangan berbeda musyawarah untuk mufakat. Di sini kelihatannya masyarakat Manggarai menjunjung tinggi kesamaan martabat wanita dan pria. Oleh karena itu, wanita dan pria harus memiliki satu kesepakatan. Pola cama-cama ata mendo, teti cama-csma ata geal (pikul sama-sama yang berat, angkat sama-sama yang ringan).

5. Model Lonto Leok dalam Mbaru Gendang

Mbaru Gendang atau rumah gendang memegang peranan penting dalam setiap perhelatan budaya orang Manggarai. Mbaru Gendang merupakan sebuah tempat dilaksanakannya berbagai ritual kebudayaan orang Manggarai. Secara fisik mbaru gendang memiliki ukuran yang lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah warga di sekitarnya yang menyimbolkan bahwa rumah gendang sebagai tempat kekuasaan tertinggi dan sebagai penaung rumah-rumah di sekitarnya. Mbaru gendang dibuat tidak secara sembarangan tetapi memperhatikan unsur arsitektur dan makna-makna yang terkandung di tiap bagiannya. Unsur arsitektur mbaru gendang adalah sebagai berikut :

a. Kolong rumah (*ngaung*)

Bagian ini biasa disebut *ngaung*. Pada *ngaung* ini terdapat tiang-tiang penopang. *Ngaung* berfungsi untuk mengikat hewan peliharaan. *Ngaung* menjadi simbol dunia bawah, dunia gelap, dunia orang-orang meninggal.

b. Tempat manusia tinggal (bagian tengah rumah)

Bagian ini melambangkan dunia terang dan tempat orang Manggarai beraktivitas setiap hari guna memberikan arti bagi hidupnya di dunia ini.

Dalam bagian ini kita temukan, *pertama*, *lutur* adalah tempat dilaksanakan segala aktivitas manusia seperti upacara adat, musyawarah bagi segala kepentingan, tempat membaringkan jenazah, tempat menerima tamu-tamu penting, dll. *Kedua*, *siri bongkok* (tiang agung rumah adat) adalah tiang tengah yaitu tempat gendang dan gong digantung dan tempat bersandarnya pemimpin adat dalam memimpin upacara adat atau peristiwa-peristiwa penting lain yang berhubungan dengan warga desa. *Ketiga*, *lo'ang* adalah kamar tidur setiap keluarga yang mendiami rumah adat tersebut. *Keempat*, *sapo*, yakni tungku api yang melambangkan kehangatan dalam musyawarah. *Kelima*, *para*, yakni pintu, tempat keluar masuknya manusia dan dipakai sebagai tempat dibunuhnya hewan kurban dalam upara adat tertentu.

c. Atap

Tampak luar, yakni *pertama*, *mangka* (gasing) yang terletak di paling puncak rumah gendang. *Kedua*, *rangga kaba laki* (tanduk kerbau jantan), berada di bawah gasing dan *ketiga*, *wuwung* (atap ijuk) yang berbentuk kerucut. *Tampak dalam*, yakni *pertama*, *ngando* yang merupakan puncak bubungan rumah. *Kedua*, *kinang*, yaitu kuda-kuda atap rumah. *Ketiga*, *Renco Sepot Agu Roang Koe*, yakni tempat kediaman yang Ilahi yaitu *Mori agu Ngaran*. *Keempat*, *lempa rae* yakni tempat menyimpan makanan cadang sebagai persiapan di muism paceklik. *Kelima*, *lobo*, yakni loteng yang digunakan untuk menyimpan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Dalam pembuatan Mbaru Gendang, sangat dibutuhkan keompakan dan kerja sama dari semua warga Kampung. Semua warga kampung mengambil peranan masing-masing sesuai dengan mufakat yang telah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya. Hal ini melambangkan symbol persatuan dan kesatuan orang Manggarai yang di mana simbol persatuan juga termuat dalam nilai demokrasi di Indonesia. Salah satu karakter dasar orang manggarai (perange data manggarai) yang mengedepankan nilai gotong royong termuat dalam goet *gori cama-cama*.

Arti harifiah dari goet atau peribahasa ini adalah mau secara bersama dan bentuk konkret dari goet ini yaitu pembangunan mbaru gendang

itu sendiri. Masyarakat manggarai tidak ingin relasi sosialnya rusak karena satu dan lain hal (toe ngoeng te karukak kaeng tana) dan karena itulah dalam setiap perbedaan pendapat, masyarakat manggarai lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai sebuah kata sepakat. Secara tersirat penerapan budaya lonto leok dalam Mbaru gendang menghidupkan nilai persatuan dalam demokrasi dan juga turut menjaga asas pertama dalam Pancasila, yakni persatuan dan kesatuan Indonesia. Budaya Lonto leok yang terus hidup sampai sekarang bukanlah hasil perjuangan dari satu pihak melainkan sebuah kesadaran masyarakat manggarai untuk terus hidup berdampingan tanpa mengedepankan sebuah kepentingan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi Indonesia di samping pemilu presiden dan legislatif. Dengan adanya pesta demokrasi tersebut, dipandang sebagai suatu fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab suatu tuntutan masyarakat mengenai sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah untuk menjalankan suatu roda pemerintahan.

Pemilu Kepala Daerah mempertunjukkan suatu fenomena yang bertolak belakang dari para elit politik untuk bersaing dan juga bekerja sama. Panggung politik di daerah memberikan kesempatan yang seluasnya bagi para elit politik untuk menjadikan nilai dan ritus-ritus kebudayaan sebagai sarana untuk memperebutkan dan memenangkan kekuasaan berlatarbelakangkan ikatan primordialisme kedaerahan. Lonto-leok sebagai sebuah ikatan primordialisme kedaerahan masyarakat manggarai, kini dialihfungsikan oleh para elit lokal dan elit politik sebagai arena kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan.

Budaya Lonto Leok yang pada awalnya hanya pertemuan adat biasa kini ditransformasikan menjadi sebuah pertemuan berbasis kepentingan politik. Bukan sebuah karangan tetapi berdasarkan fakta yang ada dilapangan, bahwa budaya lonto leok manggarai telah ditunggangi oleh elit-elit lokal berbasis kepentingan politik untuk menarik simpati masyarakat dalam memperjuangkan kekuasaan. Elit-elit lokal sebelum pemilihan kepala daerah dilaksanakan, merupakan sebuah kewajiban untuk

mengumpulkan masyarakat untuk turut serta ikut dalam sebuah pertemuan adat yang dilaksanakan di rumah adat (mbaru gendang) guna membahas visi dan misi politik mereka.

Hegemoni dan dominasi elit lokal dalam budaya lonto leok menunjukkan bahwa eksistensi mereka patut diperhitungkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Manggarai. Keterlibatan elit lokal dalam perhelatan pilkada Manggarai memberikan warna tersendiri bagi iklim politik lokal Manggarai. Lewat pengaruhnya yang begitu dominan dalam suatu pengambilan keputusan politik warga kampung (beo), secara tidak langsung menyebabkan terjadinya perselingkuhan antara budaya dan politik, di mana budaya mencampuri urusan politik dan begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini akan terfokus pada keterlibatan elit lokal pada pilkada Manggarai, sejauhmana elit lokal menjadikan lonto leok sebagai sebuah arena kontestasi politik, dan bagaimana hegemoni atau dominasi elit lokal dalam budaya lonto leok itu sendiri. Untuk mempermudah menyusun pembahasan penelitian, maka peneliti berinisiatif membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

